

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Albert Aries, 2024. *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas Yurisprudensi & Postulat Latin*, Depok:RajaGrafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2008. *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika.

Dr. Andi Purnawati, S.H., M.H, dkk, 2025. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Eureka Media Aksara.

Ecep Nurjamal, 2023. *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru*, Jakarta:Edu Publisher.

Eddy O.S. Hiariej, 2020. *Reformasi Hukum Pidana: Menuju Sistem yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Yogyakarta:Genta Publishing.

\_\_\_\_\_,2024. *Prinsip-prinsip Hukum pidana (Edisi Penyesuaian KUHP Nasional)*, Depok:Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_, dan Topo Santoso, 2025. *Anotasi KUHP Nasional*, Depok:Rajagrafindo Persada

Hanafi Amrani, 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yoogyakarta:UII Press

Harkristuti Harkrisnowo, 2022. *Hukum Pidana Terorisme dan Narkoba*, Jakarta:Kencana.

J.E. Sahetepky, 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama.

Jimly Asshiddiqie, 2020. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.

Johnson, Robert, 2024. *Metodologi Penelitian Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Lamintang P.A.F, 2019. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.

Mahrus Ali, 2012. *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Muladi, & Nawawi Arief,B. 2009. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.

Muladi, 2019. *Lembaga Pidana Mati di Indonesia : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Bandung:Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prenada Media, edisi ke-11.

Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI PER.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta.

Supriyadi Widodo Eddyono dkk., 2017. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, Jakarta: ICJR.

Topo Santoso, 2021. *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum

Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum

Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

## **C. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

## **D. Jurnal**

Abdul Azis Muhammad, 2023. “Ancaman Hukuman Mati dalam Perspektif

Tujuan Pemidanaan” *Al-Qisth Law Rev*, Vol 7, No 1.

- Abdul Jalil Salam & Zahlul Pasha Karim, 2021. "Hukuman Mati di Indonesia: Meninjau Kembali Debat Antara Pihak yang Mendukung dan Menentang", *Lentera Huk*, Vol 8, No 1.
- Agave Frans Owen, 2023. "Hukuman Mati Terhadap Terpidana Korupsi dalam Hukum Nasional Indonesia, *UNJA Journal Of Legal Studies*, Vol 01.
- Ajie Ramdan, Rully Herdita Ramadhani & Mei Susanto, 2018. "Kebijakan Pidana Mati dalam RKUHP Ditinjau dari Aspek Politik Hukum dan HAM", *Arena Huk* , Vol 11, No 3.
- Aldy Manopo, K.Pongoh, dan Yurico Bawole, 2023. Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi 8.
- Alethea, 2024. Konstitusional Pidana Mati Bersyarat dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum* , Vol 7, No 2.
- Ansharullah Alimuddin, 2022. Konsep Pidana Mati dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang 1945 dan RUU KUHP di Indonesia, *Journal Health, Education, Economics, Science & Technology (J-HEAST)*, Vol 5, No 1.
- Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, H. K. S, 2023. Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 7, No 1.
- Deri Ardiansyah, Muhammad Adiaat, Aditya Indah Cahyani, dan Nurlaili Rahmawati, 2024. Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, Vol. 3, No. 1.

Faza, L. A. , 2024. Pembaharuan Hukum Pidana Pasca Reformasi. *Politik Hukum Pidana*.

Febrian Duta Utama, dkk, 2024. Konsep Keadilan Dalam Pwmikiran Aristoteles, *Jurnal Filsafat Terapan*, Vol 1, No 2.

Gizella, B. B. A, 2025. Menuju Sistem pemidanaan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol 7, No 2.

Hakim. L , 2020. *Penerapan dan Implementasi “Tujuan pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Deepublish.

Joko Cahyono & Faisal Santiago, 2023. “Rekonstruksi Norma Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, *Edunity Kaji Ilmu Sos Dan Pendidik* , Vol 2, No 1.

Kasmanto Rinaldi & Rio Tutrianto, 2023. “Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi pada Diskursus Pemberlakuan Hukuman Mati terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*”, Vol.5, No 3.

Kezia Kurnia dkk., 2025. Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1.

Marhaendra, R. E., Putra, T. J., & Dzaky , M. A, 2025. Perbandingan Substansi Hukum Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru: Dekolonisasi, Demokratisasi, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Vol 1, No 4.

Nabilla N. Afifah, 2024. Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan, *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 6.

Nadianti, E., & Ali kusumo, B, 2025. Politik Hukum Pidana dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol 2, No 4.

Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020. “Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Vol. 6, No. 1, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, hlm 106.

Priscilia, E., Jaya, I. N. S. P., & Pujiyono, P., 2019. Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep Kuhp, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 2

Putri, I. M, Rahmatiar, Y., & Abbas . M, 2023. Kebijakan Pemberian Vonis Mati atau Pidana Mati yang Ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Formulasi Perspektif Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Wajah Hukum*, Vol 7, No 1.

Saiful Abdullah, 2009. Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat, *Law Reform* , Vol. 4, No 2.

Setiawan, M. N., & Afita, C. O. Y, 2025. Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui KUHP Baru: Tantangan dan Peluang Menuju Keadilan Sosial, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol 11, No 2.

Slamet Tri Wahyudi, 2012. “Problematika Penerapan Hukuman Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *J Huk Dan Peradil*, Vol 1, No 2.

Syarif Saddam Rivanie. dkk, 2022. Perkembangan Teori-teori Pmeidanaan, *Halu Oleo Law Review*, Vol 6, No 2.

Titin Nurfatlah, Amiruddin Amiruddin & Ufran Ufran, 2020. “Pergeseran Paradigma Hukuman Mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Unram-Law*, Vol 4, No 1.

Waluyo, B, 2020. Pemidanaan Berbasis Kemanusiaan dalam Hukum Pidana Modern, *Jurnal Recht Vinding*, Vol 9, No 1.

#### **E. Skripsi/ Tesis**

Edita Elda, 2009. *Pengaturan Pidana Mati Sebagai Pidana Pokok Yang Bersifat Khusus dan Alternatif Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Tesis, Program S2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia.

Wulan Daricka, 2024. *Politik Hukum Pidana Terkait Dengan Perumusan Aturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Skripsi, Program S1 Ilmu Hukum, Universitas Andalas.

#### **F. Internet**

Amnesty International, 2023. “Reformasi hukuman mati membawa harapan di tengah dimulainya kembali eksekusi di seluruh Asia Tenggara”, online :<https://www.amnesty.id/death-penalty-reforms-bring-hope-amid-resumption-of-executions-across-southeast-asia/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, “3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP”,(<https://kemenkumham.go.id/berita-utama/3>), diakses pada tanggal 15 Mei 2026 Pukul 13.50 WIB.

Chairul Huda, 2025. *Kuliah Umum Pertanggungjawaban Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*,  
<https://www.youtube.com/live/jo-dlPnmfLE?si=DrsdJJHLieoBn29i>, dikunjungi pada 24 Mei 2026, pukul 16.00 WIB.

Ihsanuddin & Krisiandi, 2019. “Jokowi Sebut Ada 14 Pasal Bermasalah di RKUHP”,*KOMPAS.com*<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/20/15411811/jokowi-sebut-ada-14-pasal-bermasalah-di-rkuhp>, diakses pada tanggal 15 Mei 2026 pukul 14.00 WIB.

Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, 2015. “MK: Hukuman Mati Tak Melanggar Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, online:  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10521>. Diakses pada tanggal 15 Mei pukul 21.00 WIB.

Mochamad Januar Rizki, 2024. “Mengenal Konsep Baru Jenis Pidana dalam KUHP Nasional”,*Hukumonline*,<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-baru-jenis-pidana-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2023/> diakses pada 4 Februari 2026 pukul 20.00 WIB

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward O. S. Hiariej di Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, “RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam”,online:  
web.kemenkumham.go.id <https://www.kemenkumham.go.id/berita->

[utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam](#). Diakses pada tanggal 16 Mei 2026 pukul 13.50 WIB.

## **G. Dokumen**

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, pada tanggal 3 Oktober 2022.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Ketua Persatuan Doktor Hukum Indonesia (PDHI). Ketua Dewan Pers, dan Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), pada tanggal 23 Agustus 2022.

Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI, pada tanggal 9 November 2022.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Aliansi Reformasi KUHP, pada tanggal 14 November 2022.

Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, pada tanggal 24 November 2023.

